

STUDI PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN BONTOA, KABUPATEN MAROS

**STUDY OF CLEAN WATER MANAGEMENT AND SANITATION IN THE COASTAL AREAS OF
BONTOA DISTRICT, MAROS REGENCY**

Djusdil Akrim^{1*}, Rumpang Yusuf², Rudi Latif³, Eko Yuniarto¹

¹ Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

Email: djusdil.akrim@universitasbosowa.ac.id

² Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

³ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

Artikel info

Artikel history:

Received; 04, Juni 2025

Revised; 13, Juni 2025

Accepted; 24, Juni 2025

Abstract

The purpose of this study was to determine the existing condition of Clean Water infrastructure facilities in the Coastal Area of Tupabbiring and Bontobahri, Bontoa District, Maros Regency. The research method used is Problem Identification and Potential Analysis (IMAP). The findings in the form of clean water facilities and infrastructure in Tupabbiring and Bontobahri Village are classified as less than good because there is no PDAM water source, so that almost all people collect rainwater and use the water for bathing, washing and even drinking water sources. This can pose a serious health risk because bacterial contamination from rainwater and rusty roofs can cause various diseases. This condition shows the need to increase awareness of good health and sanitation. As well as the urgency of providing safe and sustainable access to clean water for the people of Tupabbiring and Bontobahri village.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mereview fasilitas infrastruktur air bersih dan sanitasi di Wilayah Pesisir Tupabbiring dan Bontobahri, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP). Temuan berupa sarana dan prasarana air bersih di Desa Tupabbiring dan Bontobahri tergolong kurang baik karena belum ada sumber air PDAM, Hal ini disebabkan oleh fasilitas PAMSIMAS yang tidak beroperasi maksimal dan carut-marutnya

kontrak kerjasama pengelolaan air salah Desa bersama mitra PANSIMAS Desa lain. Selanjutnya masalah sanitasi lebih banyak dialami kelompok masyarakat rentan akibat rendahnya kesadaran warga dan terbatasnya infrastruktur sanitasi. Termasuk persoalan sampah menjadi perhatian khusus dimana ada indikasi minimnya kesadaran masyarakat dan kebiasaan buruk warga dalam membuang sampah di sembarang tempat. Kondisi ini menunjukkan perlunya meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan sanitasi yang baik. Sekaligus urgensi penyediaan akses air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Tupabbiring dan Bontobahari.

Keywords:

Air Berish, Sanitasi, Pesisir

Coresponden author:

Email: author.jebe@universitasbosowa.ac.id



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

PENDAHULUAN

BONTOA saat ini adalah salah satu kecamatan dalam lingkup Kabupaten Maros, sebelumnya dinamai Kecamatan Maros Utara, terletak pada perbatasan Kabupaten Maros dengan Kabupaten Pangkep. Ibu kota kecamatan ini berada di Panjalingan, Kelurahan Bontoa dengan jarak 6 km dari Kota Turikale yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Maros. Sebelum tahun 2001, Kecamatan Bontoa bernama Maros Utara.

Pergantian nama tersebut didasarkan pada nilai historis. Kecamatan Maros Utara kala itu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1992 Pasal 5 dari hasil pemekaran wilayah Kecamatan Maros Baru tertanggal 23 Mei 1992 dengan membawahi 6 desa. Saat ini Kecamatan Bontoa terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 8 (delapan) desa dengan 37 (tiga puluh tujuh) lingkungan/dusun yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan di Kecamatan Bontoa.

Selanjutnya salah satu dari kedelapan desa tersebut adalah Desa Tupabbiring, Secara geografis mempunyai luas wilayah mencapai 310,30 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 2,213 jiwa. Desa Tupabbiring merupakan salah satu dari 8 (delapan) desa yang ada dikecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Desa Tupabbiring berada pada ketinggian \pm 2 meter dpl (longitut 6,70543 °E dan Etitut 106,70543 °E) dan curah hujan \pm 200 mm, rata-rata suhu udara 28° - 32° celcius (Akrim, Jumadil, Fikruddin, & Yuniarto, 2024).

Desa Tupabbiring adalah desa yang berada di daerah pesisir dan terletak dibagian barat ke selatan diantara seluruh Desa yang ada di kecamatan Bontoa. Desa Tupabbiring terletak 4 Km dari Ibu kota kecamatan, 15 Km dari Ibu kota Kabupaten, dan 45 Km dari Pusat Pemerintahan Provinsi. Desa Tupabbiring memiliki 6 mesjid yang tersebar disetiap dusun, 3 PAUD, 2 SD, 1 SMP, dan 1 SMA, memiliki 4 posyandu yang tersebar disetiap dusun dan memiliki 1 poskesdes (Akrim, Jumadil, Fikruddin, & Yuniarto, 2024).

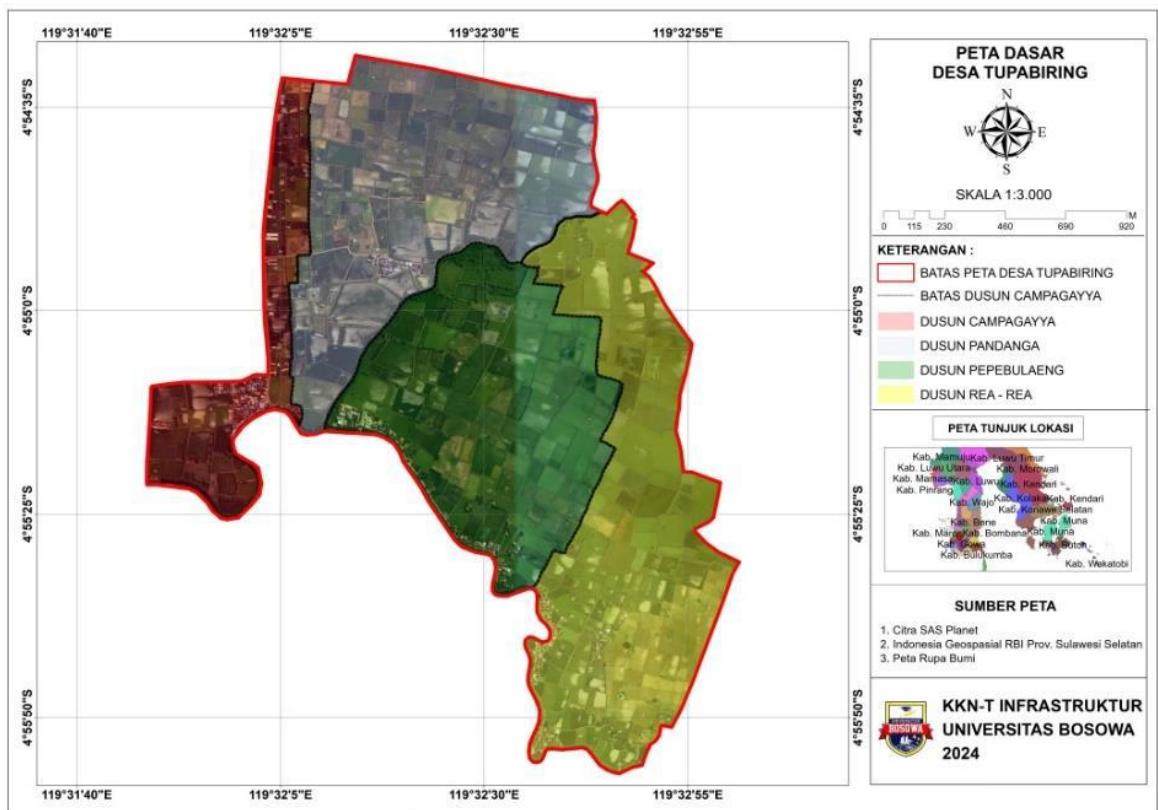
Sementara Desa Bonto Bahari yang berada di wilayah Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Bonto Bahari berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa swasembada (2011-2018). Desa Bonto Bahari memiliki luas wilayah 15,71 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.327 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 84,47 jiwa/km² pada tahun 2019.

Pusat pemerintahan desa ini berada di Dusun Cambayya. Desa Bonto Bahari dikenal pula sebagai desa nelayan karena dominan penduduknya bekerja sebagai nelayan di perairan Selat Makassar untuk mencari ikan. Desa ini memiliki pelabuhan terkenal bernama Pelabuhan Perikanan Bonto Bahari yang menjadi persinggahan kapal-kapal nelayan dari berbagai pulau kecil di sekitar gugus perairan Selat Makassar. Selain itu terdapat juga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan panjang dermaga sekitar 500 m dan luas lokasi pelelangan ikan kurang lebih 1 ha.

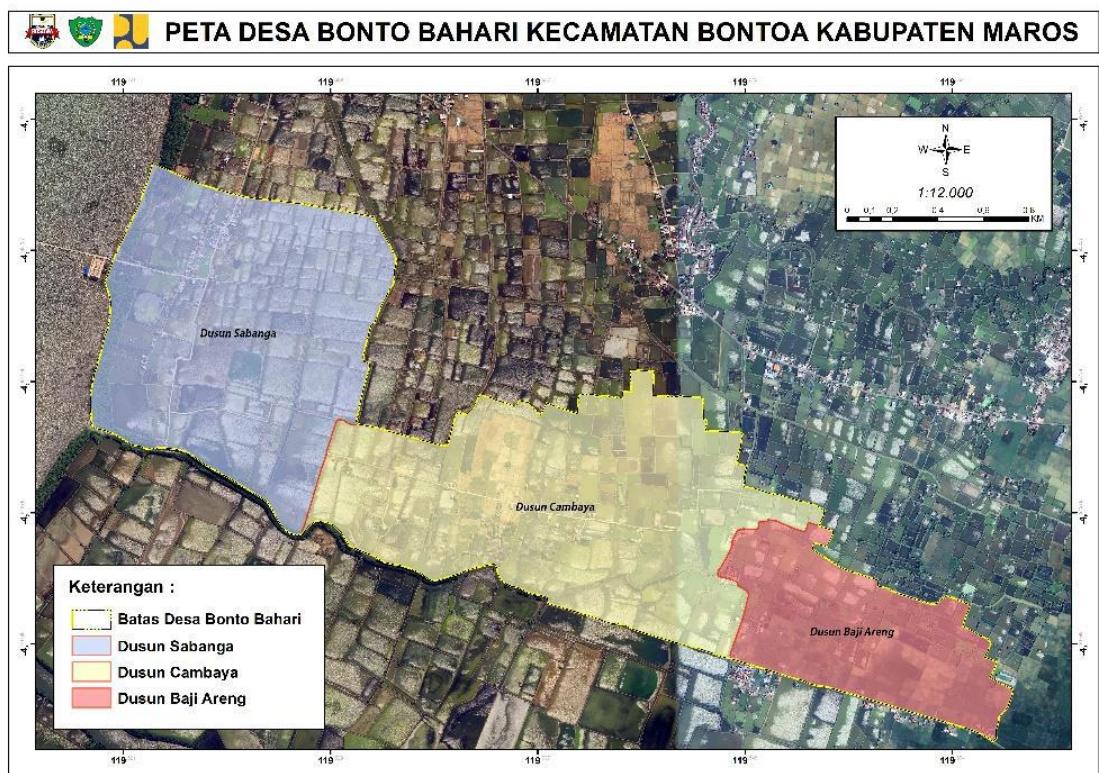
Luas wilayah Desa Bonto Bahari mencapai 15,71 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.376 jiwa pada tahun 2024. Tingkat kepadatan penduduk di desa ini adalah 87,6 jiwa per km². Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun yang sama adalah 103, yang berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 103 penduduk laki-laki. Secara administratif, Desa Bonto Bahari terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Baji Areng, Dusun Cambayya, dan Dusun Sabang. Desa ini juga memiliki 3 wilayah rukun warga (RW) yang terdiri dari 16 rukun tetangga (RT) (BPS, 28 Februari 2024).

Manurut hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan, sebagian masyarakat di Desa Tupabbiring berada pada taraf ekonomi menengah kebawah karena sebagian masyarakat di Desa tersebut tidak memiliki septic tank dan membuang limbah cairan rumah tangga atau kotorannya langsung ke sungai dan empang yang berada dibelakang rumah mereka. Bagi masyarakat yang belum memiliki jamban pribadi, mereka memilih untuk BAB di sungai.

Selain itu ditemukan permasalahan sanitasi dalam hal pembuangan sampah, dimana masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena tidak tersedia tempat pembuangan sampah (TPS). Oleh karena problematika terkait sanitasi dan ketersediaan air bersih menjadi prioritas utama dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Adapun peta wilayah kedua Desa tergambar berikut ini :



Gambar 1. Peta Dasar Desa Tupabbiring



Gambar 2. Peta Dasar Desa Bonto Bahari

Sedangkan keberadaan Lembaga Keswadayaan Masyarakat merupakan organisasi yang dibentuk dan dijalankan oleh masyarakat secara swadaya dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan pembangunan ditingkat lokal. Proses pembentukan LKM di Desa Tupabbiring pada umumnya diawali dengan mengidentifikasi masalah dan potensi desa, setelah itu masyarakat bermusyawarah untuk menginisiasi pembentukan LKM dan mendaftarkan LKM di pemerintahan desa dan kecamatan.

Proses berikutnya meliputi pelatihan bagi pengurus LKM, pelaksanaan program kerja, serta evaluasi secara berkala. Keberhasilan pembentukan LKM sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya, kepemimpinan yang kuat, dan kerja sama dengan barbagai pihak. Adapun Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang ada di Desa Tuppabiring yaitu kader posyandu, karang taruna, dan ibu PKK.

Kedua Desa ini pula dihuni oleh mayoritas oleh Suku Makassar, dengan ciri khas penggunaan Bahasa Makassar Dialek Lakiung dalam kegiatan sehari-hari. Selain Suku Makassar, terdapat pula komunitas dari Suku Bugis. Semua penduduk desa ini menganut agama Islam, dan setiap dusun memiliki setidaknya satu masjid untuk melayani kebutuhan ibadah masyarakat.

Permasalahan yang menjadi prioritas di Desa Tupabbiring dan Bontobahari, adalah keterbatasan sumber air bersih dan tidak memiliki fasilitas tempat sampah dan pengelolahan sampah, sehingga mengakibatkan sampah tertumpuk dibeberapa titik seperti selokan, sungai, dan disekitar rumah warga. Data primer dan sekunder yang digunakan dalam kegiatan ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP)

Metode Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP) adalah suatu pendekatan sistematis untuk memetakan kondisi eksisting terkait permasalahan dan potensi yang ada dalam suatu wilayah, khususnya di tingkat desa atau permukiman. Tujuan utama IMAP adalah mengumpulkan data dan informasi secara komprehensif mengenai masalah yang dihadapi serta potensi yang dapat dikembangkan, sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan atau intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Metode IMAP adalah pendekatan partisipatif dan analitis untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisis potensi yang ada di suatu wilayah, dengan tujuan menghasilkan data dan peta yang menjadi dasar perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan

Pemetaan desa dilakukan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut catatan statistik jumlah desa atau yang setara dengan desa sekitar 81.000 lebih, akan tetapi masih sangat sedikit desa yang telah memiliki peta desa (Kasim & Anies, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, didefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sistem Pengelolaan Air Bersih

Sistem Pengelolaan Air Bersih adalah serangkaian upaya terintegrasi yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas air minum yang layak bagi masyarakat. Sistem ini mencakup seluruh proses mulai dari pengumpulan air dari sumbernya, pengolahan agar memenuhi standar kesehatan, distribusi ke pengguna akhir, hingga pengawasan kualitas air secara berkelanjutan. Di Indonesia, pengelolaan air bersih melibatkan pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan lembaga terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta PDAM yang bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi air bersih di wilayah masing-masing. Sistem pengelolaan juga mengadopsi pendekatan terintegrasi (Integrated Water Resources Management/IWRM) agar pengelolaan air berjalan berkelanjutan dan efisien.

Selanjutnya Indonesia, air tanah mendominasi sumber mata air yang digunakan sehari-hari:

- Penggunaan air tanah yang berlebih berpotensi menimbulkan beberapa masalah, seperti penurunan permukaan tanah, intrusi air asin, serta penurunan kualitas air karena rentan terhadap pencemaran.
- Penggunaan air perpipaan (PDAM dan perusahaan sejenis) cukup rendah dan sebagian besar terkonsentrasi di perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan Infrastruktur distribusi air perpipaan ke wilayah desa serta ekonomi.

PDAM (perusahaan daerah air minum) kebanyakan berbasis di ibukota kabupaten dan peroataan. Kebutuhan air bersih telah diatur berdasarkan UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Barid & Hairan, 2021). Kelangkaan air serta kualitas sanitasi yang rendah merupakan permasalahan global yang memberikan dampak langsung pada kehidupan sosial dan juga perekonomian. Diperlukan peran Pemerintah dalam pengelolaan air dengan memanfaatkan sumber daya air yang berkelanjutan dan efisien sehingga air dapat tersedia di sepanjang musim

Di Indonesia, pengelolaan air bersih melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan dan regulasi terkait air bersih. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terlibat dalam aspek perlindungan lingkungan air.

3. Ruang Lingkup Wilayah Pesisir

Ruang lingkup wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh proses dan aktivitas dari kedua ekosistem tersebut. Wilayah ini mencakup bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, serta bagian laut yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Secara administratif dan hukum, ruang lingkup wilayah pesisir meliputi wilayah daratan hingga batas administratif kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut dari garis pantai pulau terluar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014. ruang lingkup wilayah pesisir adalah zona transisi yang meliputi daratan dan perairan yang saling mempengaruhi, dengan batas-batas yang ditetapkan secara ekologis, administratif, dan hukum, serta menjadi fokus pengelolaan sumber daya alam (Marlina, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan metode pendataan dan pemetaan wilayah secara komprehensif yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025 sampai bulan Mei 2025 di Desa Tupabbiring dan Bontobahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini berupa kegiatan pengabdian dan pelibatan masyarakat akan pentingnya keberadaan fasilitas infrastruktur air bersih bagi Masyarakat khususnya di wilayah pesisir.

Proses Identifikasi Masalah dan Analisa Potensi (IMAP) dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survei dan wawancara bersama masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Dalam hal ini, tim mengamati bahwa akses air bersih dan sanitasi menjadi isu utama yang perlu segera diatasi. Setelah data terkumpul, tim menganalisis informasi tersebut untuk menentukan prioritas masalah yang memerlukan tindakan, yang kemudian menghasilkan rencana aksi untuk meningkatkan infrastruktur yang ada. Survei dan identifikasi permasalahan di lapangan dengan metode door-to-door adalah langkah awal yang penting dalam mengatasi masalah persampahan dan permukiman, kemudian dituangkan dalam laporan dan IMAP (Koniyo, Gobel, & Sahaba, 2025).

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, yaitu dengan menggunakan metode Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP). Proses pengumpulan data IMAP dimulai dari observasi dan wawancara secara langsung dengan mengunjungi setiap dusun sehingga menemukan titik permasalahan yang kemudian dibuatkan Peta IMAP. Pendataan IMAP dimulai dari melakukan wawancara kepada beberapa orang terkait kebutuhan infrastruktur, kemudian melakukan observasi diseluruh Desa Tupabbiring, dan melakukan plotting atau penentuan posisi setiap objek di beberapa lokasi tertentu berdasarkan data jpeg peta citra satelit melalui aplikasi avenza. Setelah melakukan plotting kemudian data dari hasil plotting tersebut diolah melalui aplikasi ArcMap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari latar belakang diatas kita dapat memberikan beberapa solusi dan target dalam melaksanakan kegiatan, salah satu targetnya adalah dengan Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, visual, dan gambar, sedangkan penyimpulan data dalam bentuk penarikan inti dari segala perumusan masalah sebagai bahan acuan. Data primer yang dikumpulkan adalah pemahaman informan tentang air bersih, warga yang membutuhkan air bersih, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan air bersih, persepsi warga mengenai kekurangan air bersih selama di musim kemarau. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan berupa data penduduk dan kebutuhan air skala rumah tangga di wilayah pesisir.

1. Deskripsi Fasilitas Infrastruktur

Berdasarkan hasil asessment awal yang dilaksanakan di Desa Tupabbiring dan Desa Bonto Bahari, pada masing-masing dusun dari kedua wilayah administratif desa tersebut dengan fokus pengambilan data yang terkait antara lain :

1. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga berdasarkan Klasifikasi Kesejahteraan
2. Jumlah Penduduk dan Akses Awal Terhadap Sarana Air Minum dan Sanitasi
3. Fasilitas Kesehatan yang Terdapat di Wilayah Desa/Kelurahan

a. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga berdasarkan Klasifikasi Kesejahteraan

Tabel -1 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga berdasarkan Klasifikasi Kesejahteraan
Desa Tupabbiring

Dusun/RW	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Tingkat Kesejahteraan (rumah/kk)			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kaya	Menengah	Miskin	Jumlah
Campagaya	370	335	705	57	67	13	137
Pandanga	224	211	435	13	57	21	91
Pepebulaeng	206	210	416	12	43	17	72
Rea-Rea	319	338	657	24	52	31	107
Total	1.119	1.094	2.213	106	219	82	407

Berdasarkan tabel diatas, Desa Tupabbiring memiliki empat Dusun yaitu Campagaya, Pandanga, Pepebulaeng, dan Rea-Rea, mencapai 2.213 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 1.119 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 1.094 jiwa. Dusun dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Campagaya dengan total 705 jiwa, terdiri atas 370 laki-laki dan 335 perempuan, diikuti oleh Rea-Rea dengan 657 jiwa (319 laki-laki dan 338 perempuan). Sementara itu, Pandanga memiliki 435 jiwa (224 laki-laki dan 211 perempuan), serta Pepebulaeng memiliki jumlah 416 jiwa (206 laki-laki dan 210 perempuan).

Dari sisi jumlah rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan, total rumah tangga di keempat dusun adalah 407. Sebanyak 106 rumah tangga masuk kategori kaya, 219 kategori menengah, dan 82 kategori miskin. Dusun Campagaya memiliki rumah tangga terbanyak, yaitu 137 rumah tangga, dengan 57 kaya, 67 menengah, dan 13 miskin. Rea-Rea memiliki 107 rumah tangga, terdiri dari 24 kaya, 52 menengah, dan 31 miskin. Pandanga memiliki 91 rumah tangga (13 kaya, 57 menengah, dan 21 miskin), sementara Pepebulaeng memiliki 72 rumah tangga (12 kaya, 43 menengah, dan 17 miskin). Data ini memberikan gambaran tentang distribusi penduduk dan tingkat kesejahteraan rumah tangga di masing-masing dusun.

Tabel -2 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga berdasarkan Klasifikasi Kesejahteraan

Desa Bonto Bahari

Dusun/RW	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Tingkat Kesejahteraan (rumah/kk)			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kaya	Menengah	Miskin	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cambaya	164	180	344	9	51	53	113
Sabanga	392	432	824	14	81	121	216
Bajireng	101	107	208	16	28	20	64
Total	657	719	1.376				393

Desa Bonto Bahari memiliki total jumlah penduduk sebanyak 1.376 jiwa yang tersebar di tiga dusun: Cambayya, Sabanga, dan Bajireng. Dari keseluruhan penduduk tersebut, 657 jiwa adalah laki-

laki dan 719 jiwa adalah perempuan. Pembagian jumlah penduduk serta tingkat kesejahteraan di setiap dusun menunjukkan variasi yang cukup signifikan.

Dusun Cambayya memiliki jumlah penduduk 344 jiwa, dengan 164 laki-laki dan 180 perempuan. Di dusun ini terdapat 113 rumah tangga, yang terbagi menjadi tiga kelompok tingkat kesejahteraan: 9 rumah tangga termasuk kategori kaya, 51 rumah tangga tergolong menengah, dan 53 rumah tangga berada di kategori miskin.

Sementara itu, Dusun Sabang adalah dusun terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 824 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 392 orang, dan perempuan sebanyak 432 orang. Di Sabang, terdapat 216 rumah tangga, dengan 14 di antaranya berada dalam kategori kaya, 81 rumah tangga tergolong menengah, dan 121 rumah tangga termasuk kategori miskin.

Dusun Bajiaireng, sebagai dusun dengan jumlah penduduk terkecil, memiliki 208 jiwa, terdiri dari 101 laki-laki dan 107 perempuan. Di Dusun Baji Areng tersebut terdapat 64 rumah tangga, yang terdiri dari 16 rumah tangga kaya, 28 rumah tangga menengah, dan 20 rumah tangga miskin.

Berdasarkan data secara keseluruhan Desa Bonto Bahari memiliki total 393 rumah tangga, dengan rincian 39 rumah tangga berada dalam kategori kaya, 160 rumah tangga tergolong menengah, dan 194 rumah tangga berada dalam kategori miskin. Data ini mencerminkan kondisi kesejahteraan di desa, di mana mayoritas rumah tangga termasuk dalam kategori menengah dan miskin.

2. Jumlah Penduduk dan Akses Awal Terhadap Sarana Air Minum dan Sanitasi

Tabel-3 Jumlah Penduduk dan Akses Awal Terhadap Sarana Air minum dan Sanitasi Tupabbiring

Dusun/RW	Jumlah		Rumah tangga yang mempunyai akses awal	
	Penduduk (jiwa)	Rumah Tangga (rumah/kk)	Sarana air minum (rumah/kk)	Sarana sanitasi (rumah/kk)
Campagaya	705	137	168	110
Pandanga	435	91	111	87
Pepebulaeng	416	72	84	45
Rea-rea	657	107	124	83
Total	2.213	407	487	325

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk di empat dusun, yaitu Campagaya, Pandanga, Pepebulaeng, dan Rea-Rea, mencapai total 2.213 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 407 rumah tangga. Dusun Campagaya memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 705 jiwa dengan 137 rumah tangga, disusul oleh Rea-Rea dengan 657 jiwa dan 107 rumah tangga. Dusun Pandanga memiliki 435 jiwa dan 91 rumah tangga, sementara Pepebulaeng memiliki 416 jiwa dan 72 rumah tangga.

Terkait akses awal terhadap sarana air minum, jumlah rumah tangga yang memiliki akses di keempat dusun ini adalah 487 rumah tangga. Dusun Campagaya memiliki jumlah rumah tangga tertinggi yang memiliki akses air minum, yaitu 168 rumah tangga, diikuti oleh Dusun Rea-Rea dengan 124 rumah tangga, Dusun Pepebulaeng sebanyak 84 rumah tangga.

Sementara itu, akses awal terhadap sarana sanitasi dimiliki oleh 325 rumah tangga secara keseluruhan. Campagaya juga memiliki akses sanitasi tertinggi dengan 110 rumah tangga, disusul oleh

Rea-Rea dengan 83 rumah tangga, Pandanga dengan 87 rumah tangga, dan Pepebulaeng sebanyak 45 rumah tangga.

Data ini menunjukkan variasi tingkat akses terhadap sarana air minum dan sanitasi di masing-masing dusun. Data diatas menunjukkan bahwa secara umum Akses Awal Terhadap Sarana Air Minum dan Sanitasi dari keempat dusun yang ada di wilayah Desa Tupabbiring masih termasuk dalam kategori sangat rendah. Berdasarkan investigasi awal yang telah dilakukan terkait keterbatasan warga atau masyarakat secara umum terhadap kedua aspek infrastruktur tersebut.

Tabel -4 Jumlah Penduduk dan Akses Awal Terhadap Sarana Air minum dan Sanitasi

Dusun/RW	Jumlah		Rumah tangga yang mempunyai akses awal	
	Penduduk (jiwa)	Rumah Tangga (rumah/kk)	Sarana air minum (rumah/kk)	Sarana sanitasi (rumah/kk)
1	2	3	4	5
Cambaya	344	113	-	113
Sabanga	824	216	-	216
Bajaireng	208	64	-	64
Total	1376	393	-	393

Desa Bonto Bahari, yang terdiri dari tiga dusun yaitu Cambayya, Sabanga, dan Bajaireng, memiliki total jumlah penduduk sebanyak 1.376 jiwa yang tersebar dalam 393 rumah tangga. Distribusi penduduk dan rumah tangga bervariasi di setiap dusun. Dusun Cambayya dihuni oleh 344 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 113, sementara Dusun Sabanga, yang merupakan dusun terbesar, memiliki 824 jiwa dengan 216 rumah tangga. Dusun Bajaireng memiliki jumlah penduduk 208 jiwa dengan 64 rumah tangga.

Dalam hal akses terhadap fasilitas sanitasi, semua rumah tangga di ketiga dusun memiliki akses ke sarana sanitasi yang memadai. Namun, belum ada data mengenai akses terhadap sarana air minum yang tercatat dalam tabel, menunjukkan bahwa data terkait infrastruktur air bersih masih perlu diperbarui atau belum tersedia secara lengkap. Ini menandakan bahwa meskipun fasilitas sanitasi telah mencakup seluruh rumah tangga, akses air minum yang aman perlu menjadi perhatian penting bagi pengembangan infrastruktur desa di masa mendatang.

3. Fasilitas Kesehatan yang Terdapat di Wilayah Desa/Kelurahan

Tabel-5 Fasilitas Kesehatan yang Terdapat di Wilayah Desa Tupabbiring

Fasilitas kesehatan	Jumlah	Lokasi
Puskesmas	-	-
Puskesmas pembantu	-	-
Poskesdes	1	Dusun Campagaya
Posyandu	1	Dusun Campagaya
	1	Dusun Pandanga
	1	Dusun Pepebulaeng
	1	Dusun Rea-rea
Jumlah	5	

Berdasarkan data, fasilitas kesehatan di wilayah Desa Tupabbiring terdiri atas lima jenis fasilitas yang tersebar di beberapa dusun. Terdapat satu Puskesmas Pembantu dan satu Poskesdes yang keduanya berlokasi di Dusun Campagaya. Selain itu, masing-masing dusun, yaitu Pandanga, Pepebulaeng, dan Rea-Rea, memiliki satu Posyandu. Tidak terdapat Puskesmas utama di wilayah ini. Dengan adanya lima fasilitas kesehatan ini, pelayanan kesehatan di Desa Tupabbiring diharapkan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat di setiap dusun. Namun, sebaran fasilitas yang terbatas menyoroti perlunya peningkatan akses dan jumlah fasilitas kesehatan untuk mendukung pelayanan yang lebih merata.

Tabel -6 Fasilitas Kesehatan yang Terdapat di Wilayah Desa Bonto Bahari

Fasilitas kesehatan	Jumlah	Lokasi
(1)	(2)	(3)
Puskesmas	-	-
Pos KB	1	Dusun Sabanga
Pos Bersalin	1	Dusun Sabanga
Posyandu	1	Dusun Sabanga
	1	Dusun Cambaya
	1	Dusun Baji Areng
Total	5	

Desa Bonto Bahari memiliki beberapa fasilitas kesehatan yang tersebar di tiga dusunnya. Meskipun desa ini tidak memiliki puskesmas, berbagai layanan kesehatan dasar tersedia untuk masyarakat. Di Dusun Sabanga, terdapat satu Pos KB, satu Pos Bersalin, serta satu Posyandu yang melayani kebutuhan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dua Posyandu lainnya dapat ditemukan di Dusun Cambayya dan Dusun Bajiaeng.

Secara keseluruhan, terdapat lima fasilitas kesehatan di Desa Bonto Bahari. Meskipun belum ada layanan puskesmas di tingkat desa. Namun keberadaan Dermaga Bahari sebagai pelabuhan PPI atau Perikanan Tangkap seharusnya wilayah ini dilengkapi fasilitas Puskesmas untuk menunjang aktifitas warga. Adapun fasilitas yang ada saat ini lebih difokuskan pada kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan dasar, terutama di bidang ibu dan anak.

4. Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP)

Tabel-7 Masalah dan Analisis Potensi Masyarakat Desa Tupabbiring

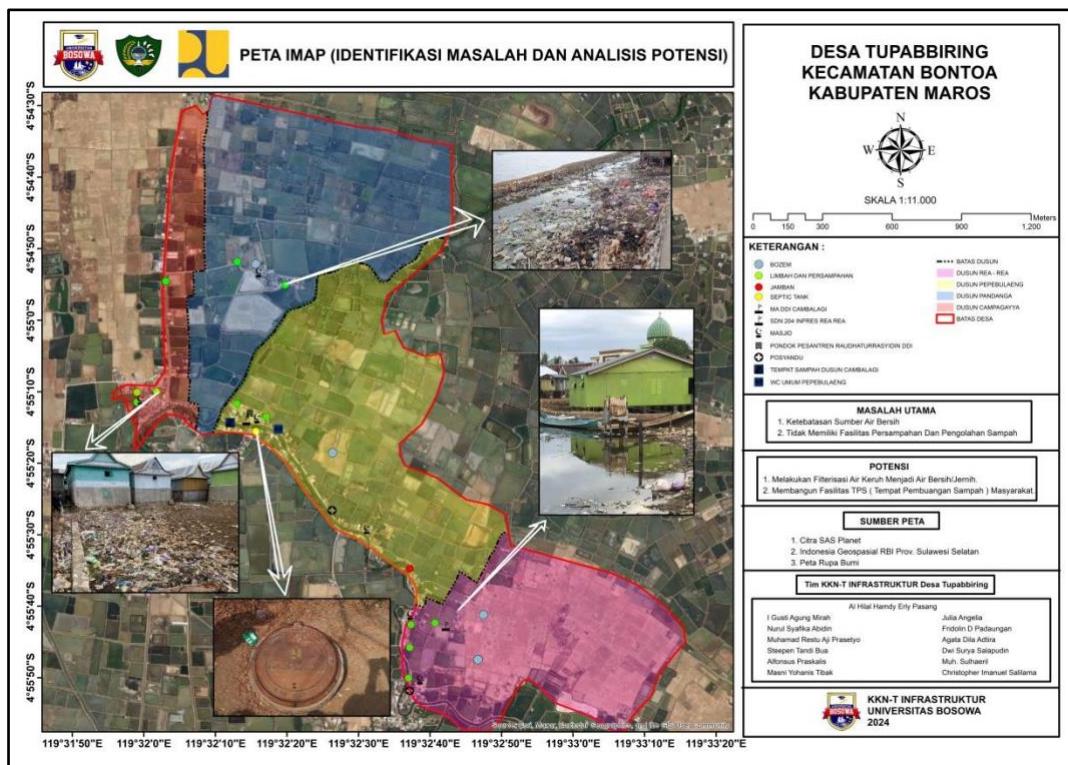
Masalah	Kelompok Masyarakat yang Menghadapi Masalah	Lokasi Terjadi Masalah	Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Masalah	Upaya yang Ingin Masyarakat Lakukan Untuk Peningkatan	Potensi Masyarakat Untuk Upaya Perbaikan/ Peningkatan
Air Minum	Masyarakat di Desa Tupabbiring	Desa Tupabbiring	Kemarau dan kurangnya pasokan sumber air bersih	Melakukan sistem filterisasi air bersih	Masyarakat membeli air bersih pada saat kemarau dan menampung air hujan jika hujan turun

Sanitasi	Masyarakat di Desa Tupabbiring	Desa Tupabbiring	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan <i>septic tank</i>	Membuat saluran pembuangan air rumah tangga ke sungai	Sebagian masyarakat menggunakan empang sebagai tempat pembuangan air kecil dan besar. Selain itu menggunakan alternatif gorong-gorong yang mengalir ke sungai sebagai saluran pembuangan air kecil dan air besar
Sampah	Masyarakat di Desa Tupabbiring	Desa Tupabbiring	Tidak memiliki tempat sampah dan pengolahan sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolahan sampah	Menyediakan pengelolahan sampah dan memberikan edukasi mengenai pengelolahan dan daur ulang sampah	Membakar sampah sebagai bentuk mengurangi penumpukan sampah karena di Desa tersebut belum terdapat mobil pengangkut sampah

Desa Tupabbiring, masyarakat menghadapi tiga masalah utama yaitu terkait air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Masalah air minum muncul akibat kemarau yang berkepanjangan dan kurangnya pasokan sumber air bersih. Untuk mengatasinya, masyarakat berupaya melakukan sistem filtrasi air bersih serta membeli air bersih saat kemarau. Selain itu, mereka juga memanfaatkan air hujan saat musim penghujan sebagai alternatif.

Masalah kedua adalah terkait sanitasi dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan *septic tank* mengakibatkan sebagian besar limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai. Untuk mengatasinya, masyarakat berinisiatif membuat saluran pembuangan air rumah tangga yang lebih baik, seperti penggunaan gorong-gorong alternatif untuk mencegah pencemaran sungai.

Masalah terakhir adalah pengelolaan sampah. Desa ini tidak memiliki fasilitas tempat sampah yang memadai, sehingga masyarakat sering kali membuang sampah secara sembarangan atau membakarnya. Selain itu, rendahnya edukasi tentang pengelolaan sampah juga memperburuk situasi. Untuk itu, masyarakat berusaha menyediakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terorganisir dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang.



Gambar 3. Ilustrasi Peta Sosial dan Infrastruktur Permukiman Desa Tupabbiring

Cara penyajian gambar dapat dilihat pada Gambar 1. Apabila gambar tersebut adalah sumber sekunder maka perlu disebutkan sumbernya. Keterangan gambar diletakan pada bagian bawah gambar. Gambar tidak perlu dibingkai.

Tabel II-5 Masalah dan Analisis Potensi Masyarakat Desa Bonto Bahari

Masalah	Kelompok Masyarakat yang Menghadapi Masalah	Lokasi Terjadi Masalah	Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Masalah	Upaya yang Ingin Masyarakat Lakukan Untuk Peningkatan	Potensi Masyarakat Untuk Upaya Perbaikan/ Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Air Minum	Seluruh Kelompok Masyarakat	Seluruh di Desa Bonto Bahari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumur PAMSIMAS tidak beroperasi 2. Sulitnya mendapatkan air bersih secara mudah dan gratis 3. Pengelolaan Air yang Buruk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan pemerintahdesa untuk perbaikan dan perawatansumur PAMSIMAS 2. Pembagian insentif bagi rumah tangga yang tidak mampu 	Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah Desa

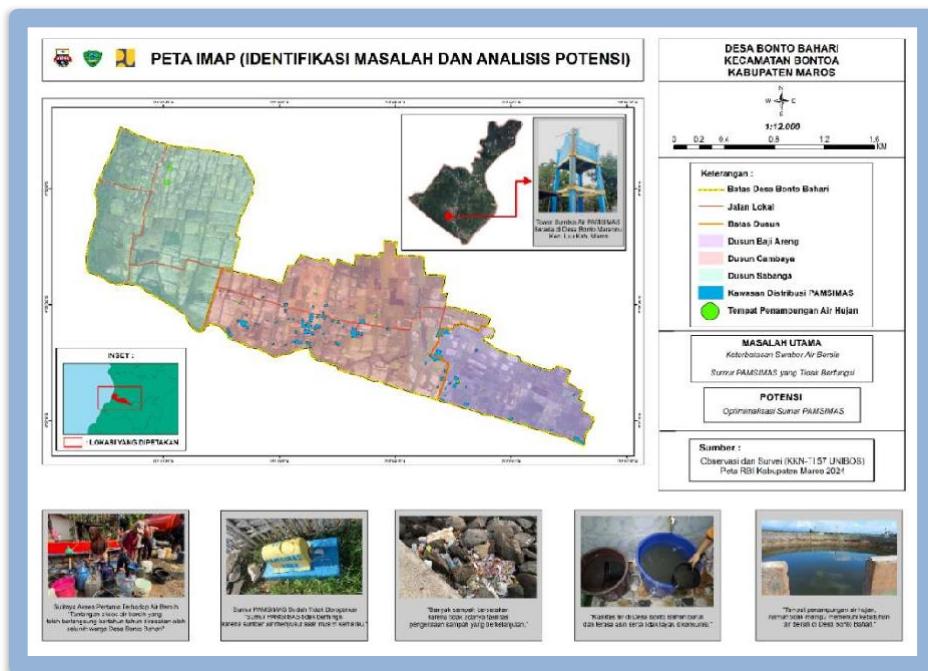
Sanitasi	Miskin (Tua dan Muda)	Dusun Baji Areng, Dusun Cambaya	1. Kesadaran Masyarakat yang Rendah 2. Kurangnya Infrastruktur Sanitasi 3. Keterbatasan Akses Teknologi Pengolahan Sanitasi	1. Pengembangan Infrastruktur Sanitasi 2. Kerja Samadengan Pemerintah 3. Kegiatan Gotong Royong	Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Sampah	Hampir Seluruh	Seluruh di	1. Kurangnya	1. Penegakan Hukum dan	Keterlibatan Masyarakat
	Kelompok Masyarakat	Desa Bonto Bahari	2. Kebiasaan Masyarakat 3. Fasilitas Pengelolaan Sampah Yang Tidak Memadai	2. Edukasi dan Penyuluhan 3. Pembentukan Kelompok atau Komunitas Peduli Lingkungan 4. Penyediaan, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	dan Pemerintah Desa

Desa Bonto Bahari menghadapi beberapa masalah terkait infrastruktur dan layanan dasar yang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu masalah utama adalah air minum, di mana seluruh penduduk desa mengalami kesulitan mengakses air bersih. Hal ini disebabkan oleh sumur PAMSIMAS yang tidak beroperasi dan carut-marutnya kontrak kerjasama pengelolaan air bersama mitra PANSIMAS Desa lain. Masyarakat berencana bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memperbaiki sumur PAMSIMAS dan membagikan insentif bagi rumah tangga yang tidak mampu, dengan potensi keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam upaya perbaikan ini.

Selain itu, masalah sanitasi lebih banyak dialami oleh kelompok masyarakat miskin di Dusun Baji Areng dan Dusun Cambayya. Rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya infrastruktur sanitasi, serta terbatasnya akses teknologi pengolahan sanitasi menjadi faktor utama penyebab. Upaya perbaikan yang ingin dilakukan meliputi pengembangan infrastruktur sanitasi, kerja sama dengan pemerintah, dan kegiatan gotong royong dan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah desa.

Masalah sampah menjadi perhatian utama dimana rendahnya kesadaran dan kebiasaan buruk dalam membuang sampah, serta fasilitas pengelolaan sampah yang tidak memadai, menjadi faktor penyebab utama. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat berencana mengadakan edukasi dan penyuluhan, menegakkan hukum terkait pengelolaan sampah, serta membentuk komunitas peduli

lingkungan. Mereka juga ingin meningkatkan fasilitas daur ulang sampah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah.



Gambar 4. Ilustrasi Peta Sosial dan Infrastruktur Permukiman Desa Bonto Bahari

A. KESIMPULAN

Data dilapangan menunjukkan bahwa secara umum Akses Awal Terhadap Sarana Air Minum dan Sanitasi dari keempat dusun yang ada di wilayah Desa Tupabbiring dan Desa Bonto Bahari masih termasuk dalam kategori sangat rendah. Berdasarkan investigasi awal yang telah dilakukan terkait keterbatasan warga atau masyarakat secara umum terhadap kedua aspek infrastruktur tersebut.

B. SARAN

Dari hasil investigasi awal Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP) menunjukkan tiga rekomendasi yang segera dituntaskan tentang Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Pesisir Desa Tupabbiring dan Desa Bonto Bahari, yaitu: (1) Terkait air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah; (2) Terkait sanitasi dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan septic tank; (3) Terkait pengelolaan sampah yang tidak memiliki fasilitas tempat sampah (TPS).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Tupabbiring dan Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dan seluruh warga beserta tokoh Masyarakat dan tokoh pemuda atas dukungan data, tenaga, dan waktu hingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

References

- Akrim, D., Jumadil, J., Fikruddin, M., & Yuniarto, E. (2024). Kondisi Eksisting Fasilitas Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah. *JBEB (JOURNAL OF ENVIRONMENT BEHAVIOR AND ENGINEERING)*, 43-51.
- Barid , B., & Hairan, A. (2021). *PENGELOLAAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT DI DUSUN PLUGON, KABUPATEN KULON PROGO*. Yogyakarta: UMY-Teknik Sipil.
- BPS, M. (28 Februari 2024). *Kabupaten Maros Dalam Angka 2024*. Maros: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.
- Kasim, M., & Anies, M. (2021). IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH DALAM PEMBUATAN PETA DESA BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) (STUDI KASUS: DESA PADDINGING, KECAMATAN SANROBONE, KABUPATEN TAKALAR). *Universitas Muslim Indonesia*, 280-286.
- Koniyo, Y., Gobel, M., & Sahaba, M. (2025). PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN PERSAMPAHAN. *JURNAL ABDI INSANI*, 1441-1450.
- Marlina, M. (2021). WILAYAH PESISIR SEBAGAI KOMPONEN KEKUATAN DAN KETAHANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Yustika*, 1-10.